

## Strategi Komunikasi Kebijakan dan Advokasi Publik dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Selatan

Muhammad Rifqi<sup>1</sup>, Putri Indriani<sup>2</sup>, Rulinawaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: [elmiwahyu80@gmail.com](mailto:elmiwahyu80@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received December 26, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 02, 2025

#### Keywords:

Free Nutritious Meal Program;  
Policy Implementation; Policy  
Communication; Public  
Advocacy; South Tangerang  
City

---

### ABSTRACT

*The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a strategic public policy designed as a systematic nutritional intervention to improve the quality of human resources while simultaneously reducing stunting and educational inequality in Indonesia. In urban contexts such as South Tangerang City, the implementation of this program faces complex challenges that extend beyond technical aspects, particularly in relation to policy communication and public advocacy within a socially dynamic and digitally literate society. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program in South Tangerang City by focusing on the effectiveness of policy communication strategies and public advocacy, as well as the factors influencing their implementation. The research employs a qualitative approach using a literature study method, with secondary data derived from policy documents, government regulations, official reports, and relevant national and international academic journals. Data analysis is conducted through descriptive qualitative analysis using George C. Edwards III's policy implementation model, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the MBG program is strongly influenced by policy communication that remains largely administrative and one-way, limited local-level resources, variations in implementers' commitment, and complex bureaucratic structures and inter-agency coordination. The study concludes that the success of the Free Nutritious Meal Program is determined not only by budget availability and technical mechanisms but also by effective, dialogical, and inclusive policy communication and public advocacy. Therefore, this study recommends strengthening participatory policy communication, enhancing human resource and managerial capacity at the local government level, reinforcing implementers' commitment, and simplifying bureaucratic structures to ensure the effectiveness and sustainability of the Free Nutritious Meal Program in the future*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received December 26, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 02, 2025

---

### ABSTRACT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik strategis yang dirancang sebagai intervensi gizi sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting dan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks daerah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, implementasi

**Kata Kunci:**

Program Makan Bergizi Gratis,  
Implementasi, Kebijakan,  
Komunikasi, Kebijakan,  
Advokasi Publik, Kota  
Tangerang Selatan

program ini menghadapi tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi kebijakan dan advokasi publik di tengah masyarakat yang kritis dan melek informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Selatan dengan menitikberatkan pada efektivitas strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan sumber data berupa dokumen kebijakan, regulasi pemerintah, laporan instansi terkait, serta artikel ilmiah dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan yang masih cenderung administratif dan satu arah, keterbatasan sumber daya di tingkat daerah, variasi komitmen pelaksana kebijakan, serta kompleksitas struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan mekanisme teknis, tetapi juga oleh strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik yang efektif, dialogis, dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi kebijakan berbasis partisipasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajerial pemerintah daerah, penguatan komitmen pelaksana kebijakan, serta penyederhanaan struktur birokrasi guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

**Corresponding Author:**

Muhammad Rifqi  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Email: [elmiwahyu80@gmail.com](mailto:elmiwahyu80@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan transformatif yang lahir dari visi besar pembangunan Indonesia menuju tahun 2045. Kebijakan ini bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan instrumen intervensi gizi sistematis yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan stunting secara simultan. Dalam skala nasional, program ini merespons fakta bahwa kualitas kesehatan dan kognitif generasi muda sangat bergantung pada asupan nutrisi di masa pertumbuhan (Wahyuningsih et al., 2025). Sejalan dengan pilar "Asta Cita", penetapan program MBG menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa setiap anak sekolah memiliki kesiapan fisik dan mental yang optimal dalam menempuh pendidikan. Program makan bergizi gratis, atau dikenal sebagai MBG, merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta mendukung keberhasilan pendidikan mereka (Pujiyanto & Solihat, 2026). Program ini dirancang untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan status gizi, dan mendukung prestasi akademik siswa

di berbagai tingkat pendidikan. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan MBG memiliki dampak positif pada kehadiran dan prestasi akademik siswa, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas asupan gizi mereka. Inisiatif ini telah diimplementasikan di sejumlah wilayah di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi (Ritonga et al., 2025).

Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dengan dinamika sosial yang sangat aktif, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memiliki posisi strategis dalam tahap awal penetapan kebijakan ini. Walaupun secara umum angka kemiskinan di Tangsel berada di bawah rata-rata nasional, tantangan ketimpangan akses gizi dan gaya hidup urban yang kurang sehat tetap menjadi isu krusial. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengambil langkah proaktif dengan menjadikan wilayah ini sebagai lokus uji coba (*pilot project*) melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan para pelaku UMKM lokal. Langkah awal penetapan MBG di Tangsel ditandai dengan pemetaan sekolah-sekolah sasaran serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan. Namun, teknis logistik dan anggaran hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya yang sering kali lebih menentukan keberhasilan kebijakan adalah bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan kepada masyarakat luas yang memiliki tingkat literasi dan kekritisan tinggi seperti warga Tangerang Selatan.

Transisi kebijakan dari tahap perencanaan menuju implementasi lapangan di Kota Tangerang Selatan sering kali diwarnai oleh fenomena kebisingan informasi (*information noise*), di mana masyarakat urban yang kritis dan melek digital cenderung memberikan respons beragam terhadap setiap langkah awal penetapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah dinamika tersebut, strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik menjadi instrumen vital yang tidak sekadar berfungsi sebagai sarana sosialisasi satu arah, melainkan sebagai upaya sistematis untuk membangun dialog transparan, mengelola ekspektasi publik, dan menciptakan legitimasi yang kuat di tingkat local (Khairiah et al., 2025). Komunikasi kebijakan diarahkan untuk mengonstruksi narasi bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia, guna meredam kekhawatiran terkait higienitas masakan, standar gizi, maupun akuntabilitas anggaran. Sementara itu, advokasi publik berperan dalam membangun koalisi strategis lintas sektor meliputi Pemerintah Kota, DPRD, otoritas sekolah, hingga pelaku UMKM local untuk memastikan adanya penyelarasan kepentingan serta dukungan regulasi yang berkelanjutan. Melalui advokasi yang efektif, pemangku kepentingan di Tangerang Selatan tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai mitra pengawas yang memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*), sehingga potensi resistensi dapat dimitigasi melalui mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan akuntabel demi menjamin keberlangsungan program di masa depan (Febryanti et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik dijalankan dalam proses implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang Selatan, termasuk dinamika komunikasi antarinstansi, pola penyampaian informasi kepada masyarakat, serta

respons publik terhadap kebijakan tersebut. Pada bagian awal hasil dan pembahasan, penelitian ini menguraikan gambaran umum dan urgensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis nasional dalam peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai perbandingan implementasi program makan bergizi di Indonesia dengan beberapa negara lain sebagai pembelajaran kebijakan. Berikutnya, penelitian ini secara spesifik menganalisis: 1) Efektivitas strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik dalam implementasi Program MBG di Kota Tangerang Selatan. 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Program MBG berdasarkan Model Implementasi Kebijakan (Edwards, 1980) yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 3) Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik pada pelaksanaan program di masa mendatang.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah, laporan dan publikasi instansi terkait di Kota Tangerang Selatan, data statistik resmi, serta artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, dan sumber akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam menganalisis hasil metode, digunakan Teori Implementasi Kebijakan Model (Edwards, 1980). Teori ini menyoroti empat variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui teori ini, penelitian dapat mengkaji sejauh mana efektivitas komunikasi antarinstansi, kecukupan sumber daya (anggaran, logistik, dan tenaga pelaksana), sikap serta komitmen pelaksana program, serta bagaimana struktur birokrasi di Kabupaten Bandung Barat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai pelaksanaan komunikasi kebijakan dan advokasi publik dalam implementasi Program MBG di Kota Tangerang Selatan.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku teks kebijakan publik, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kelembagaan, serta aktor kebijakan, sehingga memerlukan analisis konseptual yang mendalam. Melalui metode studi literatur, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, hambatan yang sering muncul, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat daerah.

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak aktor kebijakan. Program ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, satuan pendidikan sebagai unit pelaksana teknis, serta masyarakat sebagai penerima manfaat (Chairunnisa et al., 2020). Kompleksitas aktor yang terlibat menjadikan implementasi Program MBG tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai proses administratif, melainkan sebagai proses kebijakan yang dinamis dan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan serta kondisi sosial ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas daerah berimplikasi pada variasi pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi Program MBG dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana kebijakan diterjemahkan dari rumusan kebijakan menjadi tindakan nyata di tingkat operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program MBG sangat dipengaruhi oleh keterpaduan keempat variabel tersebut, di mana kelemahan pada salah satu variabel dapat berdampak pada keseluruhan proses implementasi kebijakan.

### **Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan merupakan aspek awal dan krusial dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui berbagai saluran formal, seperti penyusunan pedoman teknis, surat edaran, rapat koordinasi, serta kegiatan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat. Kejelasan informasi mengenai tujuan program, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme pelaksanaan menjadi faktor penting yang memengaruhi pemahaman pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam Program MBG belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Informasi kebijakan sering kali disampaikan secara administratif dan bersifat satu arah, sehingga pelaksana di tingkat bawah belum sepenuhnya memahami substansi dan tujuan jangka panjang kebijakan (Subarsono, 2011). Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pelaksana lebih fokus pada pemenuhan prosedur administratif dibandingkan pemaknaan kebijakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas gizi peserta didik. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan antar daerah. Daerah yang melakukan sosialisasi secara berkelanjutan cenderung memiliki tingkat pemahaman pelaksana yang lebih baik, sedangkan daerah dengan sosialisasi terbatas menunjukkan pemahaman yang relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada variasi pelaksanaan Program MBG di lapangan dan memengaruhi efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa koordinasi komunikasi antarinstansi masih menjadi tantangan dalam implementasi Program MBG. Perbedaan interpretasi terhadap pedoman kebijakan antarinstansi dapat menimbulkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan program. Kurangnya forum komunikasi yang bersifat dialogis menyebabkan pelaksana di



tingkat daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kendala dan umpan balik terkait pelaksanaan kebijakan.

### **Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Daerah yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai cenderung mampu melaksanakan program secara lebih optimal.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala utama dalam implementasi Program MBG di berbagai daerah. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya tenaga pelaksana yang memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang gizi dan manajemen program juga memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program MBG belum sepenuhnya memadai di beberapa daerah. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti sarana distribusi makanan dan fasilitas pendukung lainnya, berdampak pada kelancaran pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Selain itu, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas implementasi Program MBG. Daerah yang memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang baik cenderung mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia, meskipun dengan keterbatasan tertentu.

### **Disposisi Pelaksana Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan (Winarno, 2012). Pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan dan manfaat Program MBG cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dalam menjalankan kebijakan. Namun demikian, hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan tidak selalu bersifat homogen. Dalam beberapa kasus, pelaksana memandang Program MBG sebagai beban administratif tambahan, sehingga pelaksanaan kebijakan dilakukan secara formalitas dan kurang berorientasi pada kualitas layanan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dukungan pimpinan, sistem insentif, serta budaya organisasi. Pelaksana yang mendapatkan dukungan dan arahan yang jelas dari pimpinan cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam menjalankan program. Sebaliknya, lemahnya dukungan organisasi dapat menurunkan komitmen dan kinerja pelaksana kebijakan.

## **Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program MBG**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga memerlukan struktur organisasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif. Struktur birokrasi yang jelas memudahkan pelaksana dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Program MBG. Ketidakjelasan pembagian peran antarinstansi berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat koordinasi di lapangan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme koordinasi antarinstansi menyebabkan pelaksanaan Program MBG kurang terintegrasi. Perbedaan prosedur kerja dan sistem administrasi antarinstansi berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur birokrasi dan penguatan koordinasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan pendekatan studi literatur dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Pembahasan difokuskan pada bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diimplementasikan sebagai kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di tingkat daerah. Melalui kerangka analisis tersebut, pembahasan ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi Program MBG. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menguraikan temuan penelitian secara deskriptif, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap tantangan dan implikasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan publik di Indonesia.

## **Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis**

Dalam kerangka pemikiran George C. Edwards III, komunikasi kebijakan dipandang sebagai fondasi utama dalam proses implementasi kebijakan publik. Komunikasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan pesan, konsistensi makna, serta kesinambungan arus informasi antaraktor kebijakan. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, komunikasi kebijakan menjadi sangat penting karena kebijakan ini memiliki tujuan strategis jangka panjang, yaitu peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia, yang harus dipahami secara utuh oleh para pelaksana.

Komunikasi kebijakan yang kurang efektif berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Ketika komunikasi lebih menekankan aspek administratif dan teknis, kebijakan cenderung dipahami sebagai sekadar kewajiban prosedural yang harus dipenuhi (Ritonga & Sazali, 2025). Kondisi ini dapat

menyebabkan pelaksana kehilangan orientasi substantif kebijakan dan mengurangi kualitas implementasi di lapangan. Dalam konteks Program MBG, hal tersebut berisiko mengaburkan tujuan utama kebijakan sebagai intervensi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, konsistensi komunikasi antarinstansi menjadi aspek krusial dalam implementasi Program MBG. Ketidaksinkronan pesan kebijakan dapat menciptakan ambiguitas dan membuka ruang bagi perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana. Edwards III menekankan bahwa distorsi komunikasi dapat melemahkan implementasi kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang bersifat dialogis, terkoordinasi, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar implementasi Program MBG dapat berjalan secara selaras dengan tujuan kebijakan.

### **Sumber Daya sebagai Faktor Penentu Efektivitas Implementasi**

Sumber daya merupakan variabel kunci dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya mencakup aspek finansial, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, ketersediaan sumber daya menjadi prasyarat utama agar kebijakan tidak hanya dapat dijalankan, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya dapat menjadi penghambat serius dalam implementasi kebijakan, bahkan ketika komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, cakupan dan kualitas pelaksanaan Program MBG berpotensi tidak optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang gizi dan pengelolaan program juga dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya di tingkat pelaksana.

Lebih jauh, Edwards III menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya harus diiringi dengan kemampuan pengelolaan yang baik. Pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dapat mengurangi dampak kebijakan, meskipun sumber daya tersedia dalam jumlah yang cukup. Dalam implementasi Program MBG, kapasitas manajerial pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **Disposisi Pelaksana dalam Implementasi Program Makan Siang Gratis (MBG)**

Disposisi pelaksana merupakan variabel yang berkaitan langsung dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan publik. Menurut Edwards III, disposisi pelaksana memiliki peran strategis karena kebijakan publik pada akhirnya dijalankan oleh individu dan organisasi yang memiliki kepentingan dan persepsi tertentu. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, disposisi pelaksana menentukan sejauh mana kebijakan dijalankan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap kebijakan cenderung menunjukkan sikap proaktif dalam menjalankan program. Mereka tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa kebijakan memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Sebaliknya, disposisi pelaksana yang lemah dapat



menyebabkan kebijakan dilaksanakan secara formalitas, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal.

Disposisi pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, seperti dukungan pimpinan, budaya kerja, dan sistem penghargaan. Dukungan pimpinan yang jelas dan konsisten dapat memperkuat komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III yang menekankan bahwa sikap dan motivasi pelaksana merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

### **Struktur Birokrasi dan Koordinasi dalam Implementasi Program MBG**

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, struktur birokrasi memiliki peran penting karena kebijakan ini melibatkan berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Struktur birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih kewenangan berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketidajelasan peran dan tanggung jawab antarinstansi dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas koordinasi. Edwards III menegaskan bahwa struktur birokrasi yang tidak mendukung dapat menjadi penghambat utama implementasi kebijakan, meskipun komunikasi dan sumber daya telah tersedia.

Oleh karena itu, implementasi Program MBG memerlukan struktur birokrasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif. Penyederhanaan prosedur, kejelasan pembagian tugas, serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berorientasi pada pencapaian tujuan kebijakan publik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik strategis yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan, stunting, dan ketimpangan kualitas pendidikan.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program MBG sangat dipengaruhi oleh keterpaduan empat variabel dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan menjadi fondasi utama yang menentukan tingkat pemahaman dan penerimaan pelaksana serta masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program. Komunikasi yang bersifat satu arah, administratif, dan kurang dialogis berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman serta menurunkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi sumber daya, ketersediaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung menjadi faktor penentu keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan Program MBG. Keterbatasan sumber daya dan lemahnya kapasitas pengelolaan di

tingkat daerah berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan, meskipun kebijakan telah dirumuskan secara komprehensif di tingkat pusat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial pemerintah daerah menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas implementasi program.

Disposisi pelaksana juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Program MBG. Pelaksana yang memiliki pemahaman, komitmen, dan sikap positif terhadap kebijakan cenderung menjalankan program secara substantif dan berorientasi pada kualitas layanan. Sebaliknya, disposisi pelaksana yang lemah dapat menyebabkan kebijakan dijalankan secara formalitas dan administratif semata, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal.

Sementara itu, struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antarinstansi menjadi faktor krusial dalam implementasi Program MBG yang bersifat lintas sektor. Struktur birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih kewenangan berpotensi menghambat koordinasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyederhanaan struktur birokrasi serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi prasyarat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Selatan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga oleh efektivitas strategi komunikasi kebijakan dan advokasi publik yang mampu membangun pemahaman, dukungan, dan rasa kepemilikan di kalangan pemangku kepentingan. Dengan memperkuat keempat variabel implementasi kebijakan secara terintegrasi, Program MBG berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2020). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (Studi di Kota Serang). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 11(2), 87–98.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Febryanti, I., Indiati, Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (mbg) (studi kasus pada sdn 3 kepanjen kabupaten malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79.
- Khairiah, U., Saputra, J. H., Warsiman, & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 196–206.
- Pujiyanto, A., & Solihat, M. (2026). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) : Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan Abstrak. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 7(1), 115–128.
- Ritonga, A. R., & Sazali, H. (2025). ANALISIS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN TERHADAP REGULASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN. *Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 32–40.
- Ritonga, A. R., Siregar, N. S. S., & Harahap, R. H. (2025). Implementasi program makan



bergizi gratis dalam peningkatan kualitas gizi dan prestasi belajar siswa. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 14(1), 45–58.

Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Wahyuningsih, E., Dewi, R., & Siswadi, H. (2025). IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS ( MBG ) TERHADAP MOTIVASI SISWA. *Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 3(2), 80–84.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.